

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Perdagangan Bebas

Istilah perdagangan bebas merupakan konsep dimana perdagangan yang tidak dibatasi oleh kebijakan pemerintah terutama terkait sektor ekspor dan impor.

Terdapat beberapa manfaat dari perdagangan bebas, yang dikemukakan oleh Douglas Irwin yaitu manfaat langsung, manfaat tidak langsung, serta manfaat moral dan intelektual (Irwin, 2009). Perdagangan bebas antar negara memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana pengaruh dari perdagangan ini adalah peningkatan permintaan barang dari luar negeri. Ekonom Adam Smith menekankan prinsip keunggulan mutlak (absolute advantage) dalam teori perdagangan bebasnya. Perdagangan memungkinkan penggunaan sumber daya secara efisien karena setiap negara akan memproduksi barang yang menjadi spesialisasinya dan memberinya keunggulan mutlak. Pendapatan nasionalnya akan meningkat (Spiegel, 1991).

Selain itu David Ricardo kemudian menjelaskan teori keunggulan. Dalam teori selama kedua negara atau lebih melakukan perdagangan, kedua negara akan sama-sama untung, karena tiap negara memiliki perbedaan spesialisasi (Ricardo, 2004).

Selanjutnya manfaat dari perdagangan bebas adalah ketersediaan barang yang lebih beragam. Dikarenakan masyarakat dapat memperoleh barang yang belum tentu diproduksi di dalam negeri. Selain itu keberagaman barang dapat menjadi suatu potensi pertumbuhan barang lainnya.

Irwin (2009) menekankan dua cara penting bagaimana perdagangan internasional menumbuhkan produktivitas: dengan memudahkan proses pengalihan teknologi yang meningkatkan produktivitas, dan dengan meningkatkan tingkat kompetisi.

Kemajuan teknologi dapat dialihkan dengan mengimpor barang modal yang merupakan hasil dari upaya riset dan pengembangan (Irwin, 2009). Penting untuk dicatat di sini bahwa ada beberapa pengetahuan yang merupakan barang publik (*public good*). Dengan hubungan yang dijalin dengan negara lain, memungkinkan peningkatan produksi didasari dengan pertukaran ilmu pengetahuan.

2.2 Latar Belakang Historis *Free Trade Zone*

Strategi industrialisasi berorientasi ekspor menjadi salah satu respon terhadap perubahan dramatis dalam struktur ekonomi dan politik internasional dalam dekade setelah Perang Dunia II. Pemerintah negara yang baru merdeka yang muncul di Asia dan Afrika setelah perang itu dihadapkan dengan masalah yang tampak sulit untuk mengubah sistem ekonomi warisan kolonial menjadi mandiri dan ekonomi nasional yang layak. Masalah ini masih dihadapi generasi sebelumnya eks-koloni (terutama di Amerika Latin) yang juga telah menemukan peran dalam ekonomi internasional pada pasca perang. Oleh karena itu terdapat munculnya perjuangan untuk industrialisasi.

Para perencana dan politisi negara-negara baru di masa pasca-perang melihat industrialisasi dan pembangunan sebagai hal yang sejalan dan sangat diperlukan. Industrialisasi dipandang sebagai sarana untuk melepaskan diri dari ketergantungan kolonial melalui ekspor produk-produk pertanian dan bahan baku. Ini akan mengatasi kendala neraca pembayaran dengan diversifikasi ekspor dan setidaknya memberikan fondasi bagi ekonomi domestik, yang modern, dan mandiri.

Aliran modal internasional telah mengikuti arus perdagangan internasional. Dan merupakan bagian utama dari investasi asing, seperti bagian utama perdagangan dunia antara negara-negara maju. Namun demikian, harus diakui bahwa dengan pertumbuhan perusahaan transnasional (TNCs), produksi teknologi berskala besar yang baru dan sebuah konsekuensi baru dari divisi internasional tenaga kerja, menjadikan peran negara-negara kurang berkembang (*less developed*

countries/LDC) dalam perekonomian internasional telah secara kualitatif berubah sejak tahun 1960- an.

Ini juga harus diakui bahwa, meskipun negara-negara kurang berkembang menempati keadaan yang rentan dan lebih atau kurang berdaya di perekonomian dunia setelah perang, tetapi sumber daya dan pasar dan kesetiaan politik mereka semua menjadi perhatian penting bagi negara-negara industri. Dari tahun 1940-an, kekuatan industri utama yang dipimpin oleh Amerika Serikat terlibat dalam upaya besar untuk merekonstruksi ekonomi pasar internasional sedemikian rupa untuk memungkinkan mereka agar mendapatkan kembali atau memperluas dominasi ekonomi mereka.

Strategi Industrialisasi yang diadopsi oleh negara-negara kurang berkembang(LDCs) dari tahun 1940an dapat dijelaskan sebagai inisiatif mereka untuk pertumbuhan ekonomi. Dan mereka juga dapat menjelaskan hal itu sebagai teknik dimana pusat metropolitan pada periode pasca-kolonial menarik bekas koloni kembali ke dalam sistem internasional yang melayani kepentingan negara-negara maju.

Kelahiran industrialisasi berbasis ekspor yang secara dekat diikuti kedatangan perusahaan transnasional (*TNC*), dimana perusahaan-perusahaan besar melakukan investasi langsung dan produksi di lokasi dua negara atau lebih. Para *TNC* yang berbeda dari investasi asing memiliki kekuatan utama yang terletak pada teknologi, keterampilan dan juga bergerak bersama dengan modal.

Perubahan dalam teknologi produksi menambahkan sebuah motif baru untuk penetrasi *TNC* di negara-negara kurang berkembang. Tapi 'dekomposisi' proses produksi yang kompleks dan lokasi sederhana, dan juga insentif tenaga kerja merupakan bagian proses di dalam negara-negara kurang berkembang yang akan bekerja untuk *TNC* jika mereka bebas untuk mengeksport komponen yang telah selesai tanpa pembatasan. Strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor idealnya melayani kebutuhan ini. Relokasi bagian dari proses produksi barang

yang diperuntukkan bagi pasar global memberikan *TNC* dan industri barat di negara asal mereka mendesak strategi ini pada negara berkembang. Terlebih, pemerintah tuan rumah negara kurang berkembang bisa dibujuk untuk menanggung sebagian biaya produksi aktual dengan menyediakan infrastruktur, situs, jasa, dan lain-lain.

Memang sebuah karakteristik strategi industrialisasi berorientasi ekspor yang sering menjadi taktik sentral telah menjadi zona pemrosesan ekspor (*EPZ*) atau zona perdagangan bebas (*FTZ*). Zonas ini merupakan kantong-kantong kecil untuk industri berbasis ekspor, dan terpisah dari ekonomi domestik negara tuan rumah.³ Berbagai istilah telah digunakan dari waktu ke waktu, mencerminkan berbagai kegiatan yang dilakukan di zona tersebut (lihat Tabel 2.1). Istilah yang paling banyak digunakan biasanya adalah *free trade zone (FTZ)*, *export processing zone (EPZ)*, *specialeconomic zone (SEZ)*, and *industrial free zone (IFZ)*. Mereka semua memiliki beberapa fitur dasar yang sama pada umumnya.

Di dalam kantong-kantong ini, perusahaan-perusahaan dari investasi asing dapat menikmati berbagai perlakuan khusus termasuk impor barang dan bahan baku yang tidak terbatas hanya pada penggunaan tanah dan bangunan bersubsidi, tetapi juga pada infrastruktur dan layanan yang disediakan oleh pemerintah lokal, insentif keuangan dan perpajakan dan konsesi kepabeanan serta peraturan yang sering kurang ketat atau dilonggarkan. Prosedur administratif biasanya efisien dan control pemerintah disederhanakan melalui otoritas zona.

Insentif yang ditawarkan bervariasi dari satu negara ke negara lain tetapi fitur umum biasanya dibuat hampir menyeluruh untuk menghindarkan kontrol perpajakan dan impor, dengan syarat impor barang setengah jadi hanya digunakan di zona dan bahwa produk akhir yang akan diekspor.

Tabel 2.1Evolusi Istilah Zona dari Waktu ke Waktu

<i>Term</i>	<i>Main users and date of first use</i>
<i>Free trade zone</i>	<i>Traditional term used since 19th Century</i>

Term	Main users and date of first use
<i>Foreign trade zone</i>	India (1983)
<i>Industrial free zone</i>	Irlandia (pre-1970)
<i>Free zone</i>	Uni Emirat Arab (1983)
<i>Maquiladores</i>	Mexico (early 1970s)
<i>Export free zone</i>	Irlandia (1975)
<i>Duty free export processing zone</i>	Korea Selatan (1975)
<i>Export processing zone</i>	Filipina (1977)
<i>Special economic zone</i>	China (1979)
<i>Investment promotion zone</i>	Sri Lanka (1981)
<i>Free export zone</i>	Korea Selatan

Sumber: The evolution of terminology over time (based on Kusago and Tzannatos, 1998)

2.3 Pengertian Free Trade Zone

Istilah *Free Trade Zone* sebagai salah satu bentuk dari zona ekonomi (*Economic Zone*) pada umumnya memiliki pengertian yang cukup beragam. Hal ini diduga sebagai akibat adanya perbedaan dalam sudut pandang atau bobot tinjauan para ahli itu sendiri tentang konsep *Free Trade Zone* tersebut. Sedangkan zona ekonomi (*Economic Zone*) menurut Capela dan Hatman (1996: 154) adalah “*The economic zone is designated regions in a country that operate under rules that provide special investment incentive, including Duty Free treatment for import and for manufacturing plants that reexport their product*”.

Dan perdagangan bebas (*free trade*) adalah konsep teoritis yang mengandaikan berlakunya sistem perdagangan internasional yang dibebaskan dari hambatan yang disebabkan oleh ketentuan pemerintah suatu negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tarif (*tariff barriers*) maupun nir-tarif (bukan tarif / *non-tariff barriers*).

Banyak definisi lain mengenai *FTZ* dapat ditemukan dalam berbagai literatur, akan tetapi terdapat empat hal penting yang merupakan karakteristik utama zona perdagangan bebas (*FTZ*), yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan kawasan industri yang mengkhususkan diri di bidang manufaktur untuk ekspor dan menawarkan perusahaan pada kondisi perdagangan bebas dan lingkungan peraturan yang liberal (World Bank, 1992).
2. Merupakan zona industri dengan insentif khusus yang dibentuk untuk menarik investor asing, di mana bahan impor mengalami beberapa tingkat proses sebelum diekspor kembali (ILO, 1998).
3. Merupakan area yang jelas dibatasi dan tertutup dengan wilayah pabean nasional, sering terletak pada lokasi geografis yang menguntungkan (Madani, 1999) dengan infrastruktur yang sesuai dengan pelaksanaan perdagangan dan operasional industri serta tunduk pada prinsip bea cukai dan *fiscal segregation*.
4. Dan merupakan suatu kawasan industri yang jelas digambarkan sebagai kantong perdagangan bebas dalam pabean dan rezim perdagangan yang ditetapkan oleh suatu negara, dimana perusahaan manufaktur asing, terutama yang melakukan produksi industri berorientasi ekspor, mendapat keuntungan dari sejumlah insentif fiskal dan keuangan (Kusago dan Tzannatos, 1998).

2.4 Penerapan FTZ di Negara Lain

Sejak awal abad ke-18, konsep ini telah banyak berkembang di berbagai belahan dunia: Gibraltar (1704), Singapura (1819), Hongkong (1848), Hamburg (1888), dan Copenhagen (1891) (El Shimy, 2008). Perkembangan konsep ini membawa banyak perubahan tentang tujuan, strategi pasar dan aktivitas dalam *FTZ* sehingga batasan yang jelas tentang evolusi terminologi *FTZ* semakin tidak nyata. Objektif dari pembentukan *FTZ* juga bermacam-macam, misalnya sebagai sarana pendukung reformasi ekonomi, pengentasan angka pengangguran, peningkatan penanaman modal asing dan bahkan sebagai sarana eksperimen dari sebuah kebijakan ekonomi.

Terdapat beberapa definisi tentang konsep Kawasan Bebas (*Free Zone/FZ*) di mana salah satunya dinyatakan dalam Specific Annex D of The Revised

Kyoto Convention (RKC) 1999, Chapter 2 yang menyatakan: *“free zone” means a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory.*

Dari berbagai referensi, terdapat beberapa karakteristik *FTZ* sebagai daerah dengan penyediaan nilai tambah antara lain : insentif bisnis dalam bentuk insentif fiskal, keuangan dan infrastruktur yang diatas rata-rata dibandingkan daerah lainnya, regulasi bisnis yang lebih fleksibel, area produksi dengan basis biaya produksi rendah yang dapat menjadi salah satu keuntungan komparatif bisnis, produksi berorientasi ekspor, paket insentif yang menarik dalam bentuk: pembebasan bea masuk terhadap pemasukan barang impor dan pembebasan pajak penjualan atau PPN terhadap perolehan barang yang dijual di dalam *FTZ* untuk keperluan produksi, serta pembebasan atau potongan pajak (*tax holiday or tax rebates*) terhadap industri berdasarkan penilaian tertentu dari kinerja ekspor mereka.

Sedangkan tujuan pembentukan *FTZ* pada umumnya bertitik fokus kepada bagaimana menarik pembentukan modal dengan investasi bisnis karena dengan adanya berbagai insentif fiskal, keuangan dan infrastruktur diharapkan iklim usaha akan semakin kondusif dan menjadi prioritas tujuan investasi. Selain itu dengan berkembangnya industri di *FTZ*, penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi dan dengan kata lain, mengurangi pengangguran. Disini terdapat efek peningkatan daya beli masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan konsumsi dan produksi lanjutan. *FTZ* juga dapat meningkatkan potensi pariwisata daerah. Tujuan lain pembentukan adalah bagaimana peningkatan potensi transfer teknologi dan *know-how*. Hal ini terkait dengan upaya perusahaan lokal yang karena potensi bisnis global akan menyesuaikan diri mereka dengan kompetisi dengan cara perbaikan kualitas produk dan layanan, kualitas sumber daya manusia, dan sistem manajemen.

Menurut Darwin Syamsulbahri, Maxensius Tri Sambodo, dan Teddy Lesmana dalam tulisannya tentang Peluang, Tantangan, dan Prakondisi bagi Program KEK: Studi Kasus Kota Batam (Diterbitkan BPMPD Prov Kepri,2010), menyatakan bahwa salah satu negara yang berhasil menerapkan SEZ adalah China. Menilik pada apa yang dilakukan oleh China dalam mempersiapkan kawasan ekonomi khususnya, setidaknya ada empat karakteristik KEK di China sebagai berikut, *pertama*, Ketersediaan berbagai macam fasilitas dasar, seperti pasokan air dan listrik dengan baik dipersiapkan dan upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investasi asing. *Kedua*, Perlakuan yang khusus dalam kaitannya dengan pajak dan penggunaan lahan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka menarik investasi dari mereka. *Ketiga*, menghasilkan produk-produk manufaktur yang ditujukan untuk ekspor. *Keempat*, KEKdioperasikan dengan cara yang sama dengan ekonomi pasar bebas.

Kondisi di atas merupakan syarat yang perlu ada dalam suatu penerapan KEK (*necessary condition*). Namun, karakteristik-karakteristik syarat perlu di atas tidak cukup. Beberapa aspek prakondisi yang juga diperlukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Radelet (1999) antara lain *Pertama*, Keseimbangan ekonomi makro, khususnya nilai tukar yang mencerminkan keseimbangan pasar. *Kedua*, Lokasi geografis memiliki arti penting dalam hal akses ke pasar ekspor dan kaitannya dengan ekonomi domestik. *Ketiga*, Skema insentif yang diberikan(seperti pajak, bea masuk, kebebasan dalam transfer mata uang, kemudahan dalam tenaga kerja (aturan yang lebih longgar), keamanan, kesehatan, dsb).

Keempat, Manajemen kawasan yang efektif dan efisien. Kualitas manajemen dapat langsung dilihat dari besarnya biaya birokrasi dan administrasi (langsung atau tidak langsung, termasuk *opportunity cost*). *Kelima*, Jaringan infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas dan memadai. *Keenam*, Keterkaitan dengan ekonomi domestik. *Ketujuh*, Peningkatan teknologi merupakan salah satu tujuan dari pembangunan KEK. Beberapa skema telah berhasil meningkatkan kandungan teknologi dari produk yang diekspor. Contoh kandungan teknologi

ekspor dari Filipina dan Malaysia telah meningkat, rata-rata dari sekitar 20% pada akhir tahun 1980-an menjadi sekitar 75% pada awal abad ke-21. Di China dari 8% pada 1991 menjadi 40% pada 1998 (Xie Wei, 2000).

2.5 Syarat *Free Trade Zone*

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 menetapkan sejumlah kriteria bagi suatu kawasan untuk dapat diusulkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, diantaranya kriteria yang terkait dengan letak kawasan tersebut.

Menurut Prabowo dalam tulisannya tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Diterbitkan BPMPD Pemrov Kepri, 2010), terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya pembangunan kawasan khusus, antara lain: *Pertama*, membangun *good governance* di mana dalam tempo singkat pemerintah dapat menyediakan iklim usaha yang menarik dengan berbagai fasilitas seperti pembebasan bea masuk, pajak penjualan dan pajak penghasilan, prosedur birokrasi yang khusus, singkat, efektif, dan efisien). *Kedua*, berkaitan dengan skala ekonomi dari jaringan infrastruktur modern yang lebih ekonomis untuk dibangun dalam kawasan yang luasnya terbatas. Industri modern memerlukan jaringan infrastruktur modern yang andal dan terintegrasi (jalan, listrik, air, teknologi informasi dan komunikasi, pelabuhan, dsb). *Ketiga*, keterkaitan antar industri. Kawasan ekonomi khusus merupakan sarana ideal bagi terbangunnya keterkaitan yang erat dan kompleks antar berbagai industri karena kawasan ini berpotensi untuk memberikan biaya bisnis yang murah dalam lokasi yang saling berdekatan antar berbagai perusahaan. *Keempat*, efisiensi yang ditimbulkan oleh dampak aglomerasi industri.

Selain itu Ismeth Abdullah (2002) berpendapat terkait persyaratan *FTZ*, diantaranya lokasi strategis, biaya produksi kompetitif, infrastruktur modern, tersedia lahan, lingkungan bersih dan sehat, insentif yang menarik, prosedur sederhana. Kebijakan *FTZ* sendiri banyak ditemui di daerah yang secara khusus diberi 'kelebihan' lebih oleh pemerintah terkait penanganan kawasannya (Anggarwal, 2010) diantaranya:

- Extra-territorialitas: *FTZ* terletak di dalam wilayah negara namun diperlakukan sebagai di luar perbatasan negara. Fitur khusus ini adalah unik untuk *FTZ* dan dianggap sebagai perbedaan yang jelas antara *FTZ* dan jenis lain dari bisnis atau perusahaan Zona. Dalam rangka untuk *FTZ* berada di dalam negeri namun dianggap di luar perbatasan, perbatasan harus dipantau secara ketat untuk mengontrol aliran orang dan barang masuk dan keluar dari zona. Perbatasan ini mirip dengan perbatasan antara Negara.
- Letak geografis: untuk manfaat logistik dan administratif letak *FTZ* biasanya dipilih berada di daerah perbatasan untuk kemudahan pengiriman dan prosedur lainnya. Namun, dalam beberapa kasus, *FTZ* memungkinkan bisnis tertentu untuk menikmati insentif yang sama terlepas dari lokasi mereka.
- Penghindaran pajak: Umumnya, terdapat pajak untuk setiap barang yang diproduksi, tetapi di dalam kawasan *FTZ* dibebaskan dari beberapa pajak selama barang tidak dijual di dalam negeri.
- Penyediaan infrastruktur: *FTZ* menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung fungsi kawasannya. Kebanyakan *FTZ* cenderung dibangun dekat fasilitas yang telah ada untuk meminimalkan biaya konstruksi baru yang diyakini sangat mahal (Chen dan de'Medici, 2009).
- Pembatasan ekspor dan impor: di satu sisi, sebagian besar produk *FTZ* boleh dijual atau diekspor ke pasar internasional. Jika produk yang dijual di pasar domestik itu akan menyebabkan ketidakseimbangan di pasar lokal, karena produk tersebut akan memiliki biaya produksi yang jauh lebih sedikit. Di sisi lain, untuk impor, kawasan mencoba untuk menggunakan sumber daya dan produk yang juga digunakan oleh pasar internasional.
- Pembatasan kepemilikan: beberapa zona mengizinkan 100% kepemilikan investor asing sementara yang lain memerlukan investor lokal sebagai mitra (Aggarwal et al., 2008).
- Logistik dan administrasi: dasar persaingan *FTZ* terutama efektivitas logistik dan administrasinya. Yang berarti *FTZ* bertujuan untuk memiliki lebih sedikit prosedur dan peraturan untuk investor dengan mengembangkan metode

seperti "*One stop shop*" dan "*single-window*". *One stop shop* adalah salah satu strategi untuk menyelesaikan dokumentasi yang diperlukan untuk membangun bisnis berada di satu tempat. Juga, Semua prosedur yang diperlukan untuk memulai bisnis dapat diselesaikan di satu lokasi dengan birokrasi yang sangat minim atau intervensi pemerintah. Metode lain "*single-window*" sebagian besar terkait dengan aliran barang. Proses ini memungkinkan semua barang melewati *single window* agar dapat diperbolehkan akses dalam atau keluar dari *FTZ*. Kedua metode tersebut adalah contoh pembuatan strategi organisasi formal untuk membuat peraturan dan aturan lebih fleksibel dan kurang ketat.

2.6 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi.

Menurut Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000: 57), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik formal maupun informal. Dalam hal Ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah:

- a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.

c) Kemajuan teknologi;

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability) (Todaro, 2000).

1. Pertumbuhan (growth), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.
2. Pemerataan (equity), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.
3. Berkelanjutan (sustainability), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.

Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terletak pada bidang kuantitatif seperti pertumbuhan pendapatan kawasan yang dapat dipantau secara angka perkembangannya. Salah satu bukti keberhasilan pembangunan sendiri adanya pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Sementara pertumbuhan hanya melihat dari penambahan pendapatan daerah, pembangunan lebih melihat secara luas, dengan mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan kondisi sosial daerah, pendapatan per kapita, dan

pengaruh terhadap masyarakat. Sehingga untuk melihat keberhasilan ekonomi dalam menunjang kehidupan daerah nya dapat dilihat dalam segi pembangunan ekonomi daerahnya.

2.7 Indikator Pembangunan Ekonomi

Menurut Arsyad (1999) Indikator pembangunan ekonomi yang terjadi adalah kesejahteraan masyarakat di mana wilayah tersebut berada, untuk mengukur kesejahteraan masyarakat tersebut terdapat indikator-indikator antara lain:

1. Indikator Moneter

a. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Beberapa pendapat mengatakan tidak dapat secara pasti melihat perkembangan penduduk hanya dari pendapatan per kapita, namun cara ini masih digunakan dan relevan dikarenakan dapat menggambarkan besar peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

2. Indikator Non Moneter / indikator sosial

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat juga menggunakan Indeks kualitas hidup (Morris dalam Arsyad, 1999). Indeks harapan hidup ini merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu tingkat harapan hidup, angka kematian dan tingkat melek huruf. Indikator yang digunakan untuk menyusun

indeks ini adalah tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf masyarakat, tingkat pendapatan riil perkapita. Indeks ini besarnya antara 0 sampai 1 semakin mendekati 1 indeks kualitas hidupnya semakin tinggi.

Dalam perkembangannya, indeks kualitas hidup tidak dapat menggambarkan dengan pasti tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, sehingga dikembangkan bentuk perhitungan lainnya oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics pada tahun 1990. *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia kemudian digunakan sejak saat itu oleh pihak program pembangunan PBB setiap tahunnya.

Kemudian dengan perkembangan kota di dunia, banyak kebutuhan yang digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat di perkotaan yang harus dipenuhi. Fasilitas tersebut kemudian menjadi salah satu faktor dalam perkembangan kondisi kota dalam melayani kesejahteraan penduduknya. *City Development Index* (CDI) merupakan salah satu alat pengukur kinerja yang dihasilkan oleh GUIP. Selain digunakan oleh UN-HABITAT, CDI juga digunakan oleh Asian Development Bank (ADB) sebagai salah satu indikator yang digunakan dalam menyusun buku *City Data Book* yang diterbitkan oleh ADB pada tahun 2001. CDI kemudian menjadi alat perhitungan dalam melihat kesejahteraan penduduk dilihat dari sosial-ekonomi dan pembangunan fisik kota.

2.8 Analisis Kebijakan

Kebijakan memiliki beberapa pengertian, yang kemudian mengacu pada tiga hal yaitu sudut pandang, tindakan, dan peraturan. Ketiga hal tersebut menjadi dasar dalam penerepan kebijakan yang dalam hal ini bersifat publik. Menurut Carl W. Patton dan David S. Savicky, analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang diubah sebagai kontekstual dari kebijakan yang lama.

Willian Dunn (2003) mengatakan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu yang menerapkan berbagai analisis untuk menciptakan pemikiran kritis dan pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tersebut.

Quade (1982) mengatakan analisis kebijakan sebagai bentuk aplikasi penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu sosial-teknis dan diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.

Analisis kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk. Menurut Dunn (2003) terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu:

a. Analisis kebijakan prospektif

Analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif.

b. Analisis kebijakan retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif.

c. Analisis kebijakan integratif

Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Menurut teori *export base*, keberlangsungan kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh kegiatan jual beli luar daerah. Dalam praktiknya untuk mempercepat upaya daerah sebagai perwujudan otonomi daerah, diberikan lah berbagai pengaturan sesuai daerah masing-masing. Kawasan Batam dan sekitarnya berada di jalur pelayaran internasional yang memungkinkan kawasan untuk berkembang dan membantu devisa negara sehingga diterapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sesuai dengan harapan dalam penerapan KPBPB dalam mengembangkan Kawasan Batam dan sekitarnya, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan awal yaitu membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Nama / Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metodologi	Variabel	Hasil
Muhammad Zaenuddin, 2012	Kajian FTZ Batam-Bintan-Karimun	Deskriptif	Kelembagaan	Prospek FTZ
			Anggaran	Skenario penerapan FTZ
			Sumber daya dan IT	
Heidi Essam Hamed, 2014	<i>A Comparative Analysis of Free Trade Zone The Case Nasr City, Egypt</i>	Komparatif	<i>History</i>	Perbandingan FTZ Nasr City dengan ciri-ciri FTZ umumnya
			Struktur	
			Perkembangan	
Doni J Widiantono dan Ishma Soepriadi, 2009	Menakar Kerja Kota-kota Indonesia	Deskriptif	Kesejahteraan Penduduk	Tingkat CDI kota-kota di Indonesia
Yenny Lay Rade, 2014	Evaluasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang	Deskriptif	Kebijakan	Evaluasi kebijakan KPBPB terkait kerja sama dengan Negara Singapura

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2019